

PP 10/1970, PEMBERIAN TUNJANGAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 10 TAHUN 1970 (10/1970)

Tanggal: 16 MARET 1970 (JAKARTA)

[Kembali ke Daftar Isi](#)

Tentang: PEMBERIAN TUNJANGAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai langkah permulaan dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja Aparat Pemerintah dalam melaksanakan Repelita, dianggap perlu untuk memberikan tunjangan kerja kepada Pegawai Negeri Sipil dalam batas-batas kemampuan keuangan Negara;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263);
3. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 14) jo. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1967 (Lembaran-Negara tahun 1967 No. 25);
4. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967 (Lembaran-Negara tahun 1967 No. 24) sebagaimana telah diubah dan ditambah kemudian.

Memutuskan :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1.

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan setiap bulan tunjangan kerja sebesar 50% (lima puluh perseratus) diatas penghasilan yang berhak diterima menurut "PGPS-1968" (Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967) dengan ketentuan, bahwa tunjangan kerja tersebut berjumlah sekurang-kurangnya Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) sebulan. (2) Yang dimaksud dengan penghasilan dalam ayat (1) pasal ini ialah jumlah dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga, tunjangan khusus, tunjangan pelaksanaan, dan tunjangan jabatan pimpinan. (3) Jumlah penghasilan baru setelah ditambah menurut ketentuan ayat (1) pasal ini dibulatkan keatas menjadi rupiah penuh.

Pasal 2.

(1) Besarnya iuran-iuran yang dipungut dari gaji pegawai Negeri untuk membiayai usaha-usaha dalam bidang Pemeliharaan Kesejahteraan Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 *17477 Peraturan Pegawai Negeri sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1967 (Lembaran Negara tahun 1967 No. 25), ditetapkan menurut persentasi-persentasi dari penghasilan termaksud ayat (3) pasal 1 Peraturan Pemerintah ini. (2) Besarnya persentasi-persentasi termaksud ayat (1) pasal ini dan perincian penggunaannya ditentukan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Presiden.

Pasal 3.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini lebih lanjut diatur oleh Menteri Keuangan setelah mendengar Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 4.

Semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini berlaku mulai tanggal 1 April 1970. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 16 Maret 1970. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO. Jenderal TNI.

Diundangkan di Jakarta. pada tanggal 16 Maret 1970. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ALAMSJAH. Mayor Jenderal TNI.

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1970 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN-KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

I. UMUM :

1. Kegiatan bekerja dari korps Pegawai Negeri dengan hasil yang sebanyak-banyaknya adalah faktor penting bagi realisasi Pembangunan Lima Tahun,

2. Sebagai langkah permulaan untuk meningkatkan produktivitas kerja Pegawai Negeri dalam melaksanakan Repelita itu, dipandang perlu untuk memberikan tunjangan-kerja dalam batas kemampuan keuangan Negara. Tunjangan-kerja ini bukanlah merupakan suatu tunjangan umum atau bantuan umum yang berlaku bagi semua Pegawai Negeri, melainkan khusus diberikan untuk meningkatkan produktivitas para Pegawai Negeri dalam menjalankan tugas pekerjaan/jabatannya.

3. Demikian pula dianggap perlu untuk mengatur kembali *17478 penetapan persentasi iuran-iuran (serta perincian penggunaannya) yang dipungut dari Pegawai Negeri untuk membiayai usaha-usaha dalam bidang Pemeliharaan Kesejahteraan, agar penggunaan iuran-iuran tersebut lebih sesuai dengan maksud tujuan serta kepentingan dari pada usaha-usaha Kesejahteraan Pegawai yang kini sedang dijalankan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Tunjangan-kerja ini pada dasarnya tidak diberikan kepada mereka yang tidak bekerja aktif; akan tetapi dianggap layak untuk memberikan tunjangan tersebut juga kepada Pegawai yang diberhentikan dari pekerjaannya/dibebaskan dari tugasnya karena alasan-alasan diluar kehendak atau kesalahannya sendiri.

Pasal 2.

Untuk lebih mudah mengaturnya dan agar senantiasa dapat disesuaikan dengan kepentingan Pegawai, tujuan dan pentingnya kebutuhan-kebutuhan dalam bidang Kesejahteraan, maka besarnya persentasi dan pembagian penggunaannya ditentukan dengan Surat Keputusan Presiden.

Pasal 3 dan 4. Cukup jelas.

CATATAN

DICETAK ULANG
